



**INSPEKTORAT UTAMA  
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

**2023**

**LAPORAN  
AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

## **DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	2
A. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
B. Struktur Organisasi .....	3
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	7
A. Rencana Strategis .....	7
B. Perjanjian Kinerja 2022 .....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	14
A. Capaian Kinerja .....	14
B. Realisasi Anggaran .....	81
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	87
<b>LAMPIRAN</b> .....	88

## **KATA PENGANTAR**



Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat II perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kinerja Inspektorat II yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat II.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran dan indikator kinerja di Inspektorat II sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan laporan kinerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran Inspektorat II dalam melaksanakan pengawasan intern bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputy Bidang Persidangan dan Badan Keahlian menjadi lebih efisien dan efektif pada tahun-tahun selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Setjen DPR RI) dalam mewujudkan *Good Governance and Clean Government*.

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
INSPEKTUR II  
Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Tahun 2022 adalah memasuki tahun ke-3 (ketiga) dimana hampir seluruh dunia terjadi pandemi Covid 19. Pada tahun 2022, setiap orang pada umumnya sudah dapat beradaptasi dengan perubahan dalam tatanan kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan kinerja di pemerintahan. Pelaksanaan kinerja pada tahun 2021 sudah kearah digitalisasi dan *remote*. Begitu juga pada pelaksanaan kinerja di Inspektorat II, dimana kegiatan pengawasan sudah dilakukan secara *remote* dan menggunakan teknologi informasi.

Inspektorat II yang bertugas melaksanakan pengawasan intern bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian berusaha untuk tetap dapat melaksanakan tugasnya baik berupa kegiatan *assurance* maupun *consulting* dengan baik dan efektif dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai. Untuk itu, kinerja Inspektorat II didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2022.

Seluruh capaian kinerja Inspektorat II telah tercapai, dari 7 (tujuh) indikator kinerja, 3 (tiga) indikator telah melampaui dari target yaitu, indikator kinerja persentase realisasi anggaran Inspektorat II, persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II, persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II. Empat indikator kinerja sesuai target yaitu jumlah unit Eselon II yang telah menyusun *Risk Register*, jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK, tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II, tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II.

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Berikut rincian capaian indikator kinerja Inspektorat II Tahun 2022:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup bidang tugas Inspektorat II.</b>	1. Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun <i>Risk Register</i>	11 unit	11 unit	100%
	2. Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK	3 unit	3 unit	100%
	3. Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%
	4. Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%
	5. Persentase realisasi anggaran Inspektorat II	92,5%	100%.	108%
<b>Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II</b>	1. Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	70%	90,91%	129,87%
	2. Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II	50%	83,52%	167,04%

Untuk mencapai target kinerja tersebut telah dilakukan berbagai upaya diantaranya peningkatan kualitas SDM, meningkatkan sarana dan prasarana teknologi, informasi dan komunikasi pada pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Capaian realisasi anggaran tahun 2022 Inspektorat II dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebesar Rp1.405.893.908,- (satu milyar empat ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan rupiah) atau mencapai 100% dari pagu anggaran sebesar Rp1.405.896.000,- (satu milyar empat ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp2.094,- (dua ribu sembilan puluh empat rupiah), "Persentase realisasi anggaran Inspektorat II" pada tahun 2022, diperoleh nilai capaian sebesar 108%. Capaian target realisasi anggaran meningkat sebesar 0,24% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021.



# 1

## PENDAHULUAN

Tugas Pokok dan Fungsi  
Struktur Organisasi

## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat II Tahun 2022 dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat II selama Tahun 2022. Hal ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan PerMenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat II berkewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 dan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Inspektorat II di tahun mendatang. Dalam menyusun LKj, Inspektorat II berpedoman pada Peraturan Sekjen Nomor 07/PER-SEKJEN/2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan Peraturan Sekjen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021, tugas dan fungsi Inspektorat II adalah sebagai berikut:

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat II adalah:

1. Tugas

Melaksanakan pengawasan intern bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat II mempunyai fungsi:

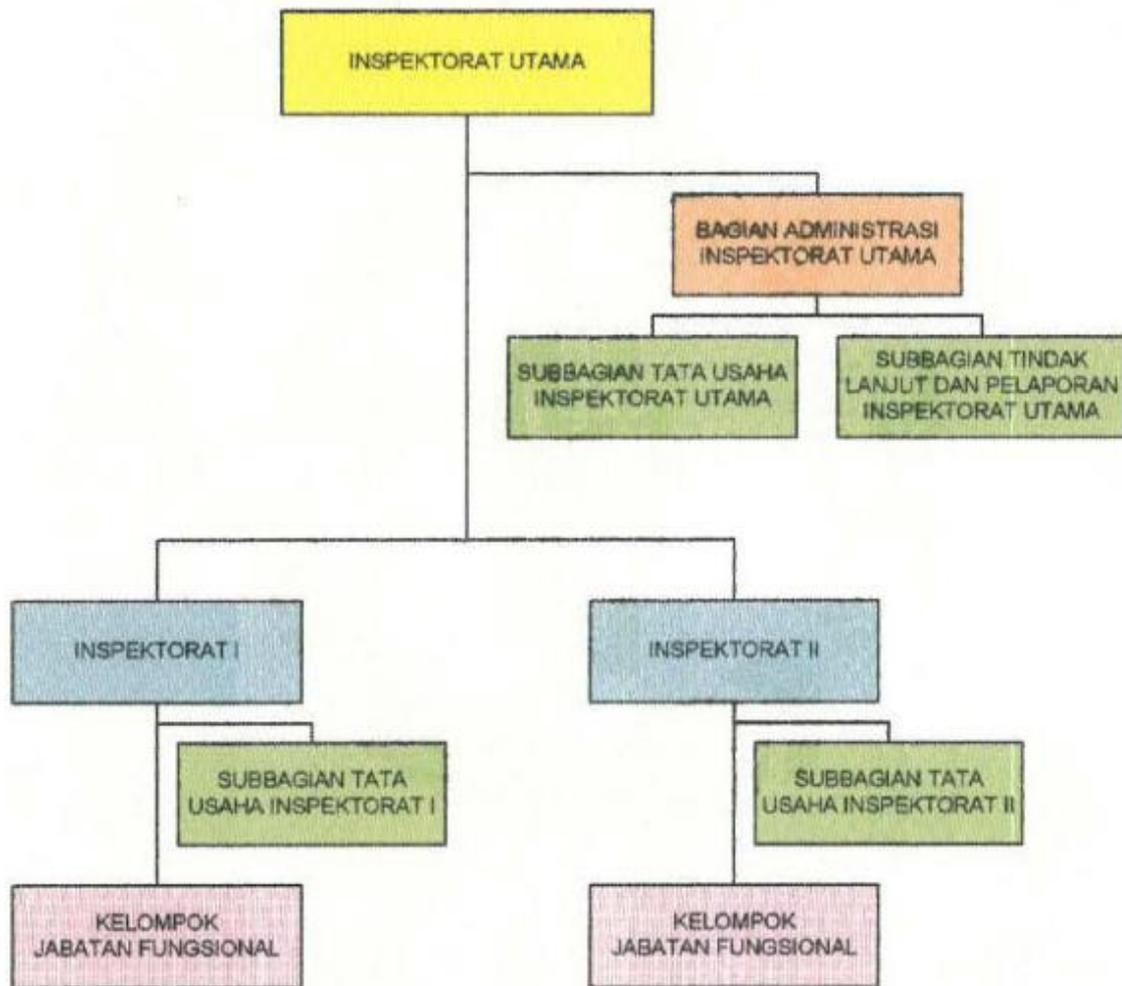
- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Inspektorat II;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan Inspektorat II;
- c. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;
- e. Pelaksanaan tata usaha Inspektorat II;
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat II;
- g. Penyusunan laporan kinerja Inspektorat II; dan
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Inspektur Utama.

**B. Struktur Organisasi**

Kedudukan Inspektorat II dalam struktur organisasi tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut :

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



Gambaran sumber daya manusia di Inspektorat II adalah terdiri atas 25 (dua puluh lima) orang SDM dengan komposisi sebagai berikut:

**Tabel 1.1  
Komposisi SDM Inspektorat II**

No.	Jabatan	Jumlah Orang
1.	Inspektur II	1
2.	Kasubbag Tata Usaha Inspektorat II	1
3.	Auditor Ahli Utama	1
4.	Auditor Ahli Madya	0
5.	Auditor Ahli Muda	5
6.	Auditor Ahli Pertama	3

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

---

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

7.	Auditor Terampil	10
8.	CPNS	1
9.	Penyusun bahan kebijakan	0
10.	Pengelola data	1
11.	PPNASN	3
Total		26



# 2

## PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis  
Perjanjian Kinerja

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Inspektorat II untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja Inspektorat II pada Tahun 2022, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengikuti Rencana Strategis (Renstra) Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program, dengan memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang mungkin timbul. Berikut penjelasan Rencana Strategis Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2022:

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Renstra Setjen DPR RI memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Setjen DPR RI untuk Tahun 2020 sampai dengan 2024.

Dalam Renstra Tahun 2020–2024 disebutkan, Visi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) adalah:

*“Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”*

Dengan misi:

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Renstra Setjen DPR RI juga ditetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih; dan
3. Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap.

Renstra Setjen DPR RI merupakan pedoman dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pemberian dukungan terhadap tiga fungsi DPR RI.

Adapun program kerja Inspektorat II mengacu pada rencana pencapaian yang telah ditetapkan untuk Periode 2020-2024 sebagai dasar dalam menyusun

kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat II dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Inspektorat II sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator kinerja kegiatan Inspektorat II berdasarkan pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024 yaitu:

**Tabel 2.1 Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 2021  
Pada Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024**

Kode	Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target			
		2021	2022	2023	2024
5793	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Oleh Inspektorat II				
	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Bidang Tugas Inspektorat II				
	1. Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun <i>Risk Register</i> .	10 unit kerja	10 unit kerja	10 unit kerja	10 unit kerja
	2. Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapatkan predikat WBK.	2 unit kerja	3 unit kerja	4 unit kerja	5 unit kerja
	3. Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%	100%
	4. Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%	100%

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Kode	Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target			
		2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkup Tugas Inspektorat II				
	5. Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II.	70%	75%	75%	75%
	6. Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II.	70%	75%	75%	75%

**B. Perjanjian Kinerja 2022**

Pada Tahun 2022 telah dilakukan penetapan Perjanjian Kinerja sebagai program strategis Sekretariat Jenderal DPR RI yang akan direalisasikan pada akhir Tahun 2022. Penyusunan Perjanjian Kinerja tersebut mengacu pada Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada Tahun 2022.

**Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2022**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup bidang tugas Inspektorat II.</b>	1. Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun <i>Risk Register</i>	11 unit
	2. Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK	3 unit
	3. Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	100%
	4. Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	100%

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	5.	Persentase realisasi anggaran Inspektorat II	92,5%
Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II	1.	Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	70%
	2.	Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II	50%

Program	Anggaran
Program dukungan manajemen	Rp1.405.896.000,-

**Tabel 2.3**

**Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022**

Tahun 2021				Tahun 2022			
Sasaran	Indikator kinerja		Target	Sasaran	Indikator kinerja		Target
Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup bidang tugas Inspektorat II.	1.	Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun <i>Risk Register</i>	10 unit	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup bidang tugas Inspektorat II.	1.	Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun <i>Risk Register</i>	11 unit
	2.	Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK	2 unit		2.	Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK	3 unit

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

	3.	Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	100%		3.	Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	100%
	4.	Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	100%		4.	Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	100%
	5.	Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat II	92,5%		5.	Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat II	92,5%
Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II	1.	Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	70%	Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II	1.	Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	70%
	2.	Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II	70%		2.	Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II	50%



# 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja  
Realisasi Anggaran

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja**

Pengukuran Kinerja atas capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan atau program /kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program /kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun setiap awal tahun berjalan. Kinerja Inspektorat II Tahun 2022 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2022 adalah sebagai berikut:

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
<b>Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup bidang tugas Inspektorat II.</b>	1.	Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun <i>Risk Register</i>	11 unit	11 unit	100%
	2.	Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK	3 unit	3 unit	100%
	3.	Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%
	4.	Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%
	5.	Persentase realisasi anggaran Inspektorat II	92,5%	100%	108%
<b>Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II</b>	1.	Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	70%	90,91%	129,87%
	2.	Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II	50%	83,52%	167,04%

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022**

Tahun 2021					Tahun 2022				
Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup bidang	1 Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun <i>Risk Register</i>	10 unit	11 unit	110%	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup	1 Jumlah unit Eselon II kerja yang telah menyusun <i>Risk Register</i>	11 unit	11 unit	100%

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

**INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

tugas Inspektorat II.	2	Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK	2 unit	3 unit	150%	bidang tugas Inspektorat II.	2	Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK	3 unit	3 unit	100%
	3	Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%		3	Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%
	4	Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%		4	Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%
	5	Persentase realisasi anggaran Inspektorat II	92,5%	99,68%	107,76%		5	Persentase realisasi anggaran Inspektorat II	92,5%	100%	108%
Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II	1	Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	70%	74%	105,71%	Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II	1	Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	70%	90,91%	129,87%

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

	2	Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II	70%	65,31%	93,3%		2	Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II	50%	83,52%	167,04%
--	---	--	-----	--------	-------	--	---	--	-----	--------	---------

**Tabel 3.3**

**Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra**

Kode	Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target				Capaian 2022	
		2021	2022	2023	2024	2022	%
5793	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Oleh Inspektorat II						
	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Bidang Tugas Inspektorat II						
	1. Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun <i>Risk Register</i> .	10 unit kerja	10 unit kerja	10 unit kerja	10 unit kerja	11 unit kerja	100%

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Kode	Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target				Capaian 2022	
		2021	2022	2023	2024	2022	%
	2. Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapatkan predikat WBK.	2 unit kerja	3 unit kerja	4 unit kerja	5 unit kerja	3 unit kerja	100%
	3. Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkup Tugas Inspektorat II						
	5. Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II.	70%	75%	75%	75%	90,91%	129,87%

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Kode	Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target				Capaian 2022	
		2021	2022	2023	2024	2022	%
	6. Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II.	70%	75%	75%	75%	83,52%	167,04%

**1. Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun *Risk Register***



**1.1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja**

Target jumlah unit Eselon II yang telah menyusun *Risk Register* Tahun 2022 adalah sebesar 11 (sebelas) unit kerja, dengan realisasi sebesar 11 (sebelas) unit kerja atau persentase capaian sebesar 100%.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Target dan Realisasi**

Target	Realisasi	Capaian
11 unit kerja	11 unit kerja	100%

Berikut adalah data rincian pendampingan penyusunan dan evaluasi *Risk Register*.

**Tabel 3.5**  
**Rekapitulasi Penyusunan dan Evaluasi *Risk Register***

No	Unit Eselon II	Identifikasi Risiko				Total Risiko
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1.	Biro Persidangan I	7	0	0	0	7
2.	Biro Persidangan II	11	0	0	0	11
3.	Biro Kesekretariatan Pimpinan	26	0	0	0	26
4.	Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	16	0	0	0	16
5.	Biro Pemberitaan Parlemen	12	0	0	0	12
6.	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat	23	9	0	0	32

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

No	Unit Eselon II	Identifikasi Risiko				Total Risiko
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
7.	Pusat Perancangan Undang-Undang dan Tata Usaha Badan Keahlian	4	1	0	0	5
8.	Pusat Kajian Anggaran	4	0	0	0	4
9.	Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	8	0	0	0	8
10.	Pusat Penelitian	6	0	0	0	6
11.	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	11	0	0	0	11

**Sistem Manajemen Risiko Instansi** | 2022 | Log Out | Profil

**Register Risiko**

Page: 1 | 1 - 26 / 26 (26) | 50

Unit Kerja	Jumlah Risiko	Aksi
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI	15	CETAK
DEPUTI BIDANG PERDIDANGAN	7	CETAK
BIRO PERDIDANGAN I	7	CETAK
BIRO PERDIDANGAN II	11	CETAK
BIRO KESekretariatan FOPHINA	26	CETAK
BIRO KERJA SAMA ANTARA PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL	16	CETAK
BIRO PEMBERTAAN PARLEMEN	12	CETAK
BIRO PROTOKOL DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	32	CETAK
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI	24	CETAK
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT	6	CETAK
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	8	CETAK
BIRO ORGANISASI DAN PERENCANAAN	8	CETAK
BIRO KEBANGKAWAN	18	CETAK
BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA	11	CETAK
BIRO UMUM	15	CETAK
BADAN KEAHLIAN	3	CETAK
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG	5	CETAK
PUSAT KAJIAN ANGGARAN	4	CETAK
PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEANGKAWAN NEGARA	8	CETAK
PUSAT PENELITIAN	6	CETAK
PUSAT PENYALJARAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG	11	CETAK
INSPEKTORAT UTAMA	17	CETAK
INSPEKTORAT I	9	CETAK
INSPEKTORAT II	22	CETAK
PUSAT PENYUSUNAN DAN PELATIHAN	16	CETAK
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI	13	CETAK

HA Data © 2021  
Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur | Telekomunikasi | Pusat Telekomunikasi | Sekretariat Jenderal DPR RI

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT II TAHUN 2022

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Gambar 3.1 Screenshot Aplikasi SIMANIS

## 1.2. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 1.6

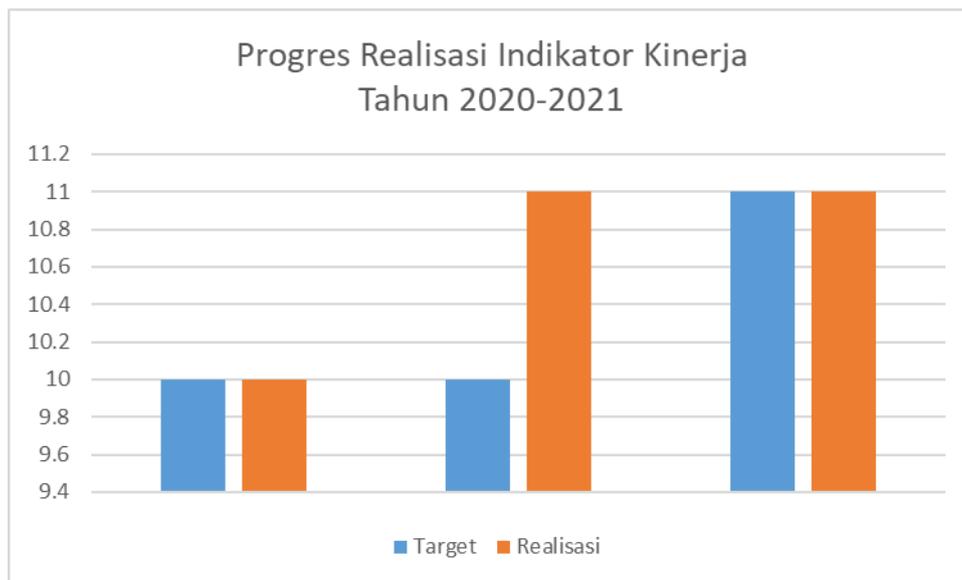
Perbandingan Capaian Kinerja 2020-2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun Risk Register	10 unit kerja	10 unit kerja	100%	10 unit kerja	11 unit kerja	110%	11 unit kerja	11 unit kerja	100%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir di atas diketahui bahwa capaian realisasi mengalami kenaikan pada tahun 2021 dengan realisasi jumlah unit kerja Eselon II yang telah menyusun *Risk Register* sebesar 11 (sebelas) unit kerja

atau persentase capaian sebesar 110%. Peningkatan realisasi sebanyak 11 (sebelas) unit kerja dari target 10 (sepuluh) unit kerja yang telah menyusun *Risk Register* dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi sesuai Persekjen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dimana Biro Protokol dan Humas yang pada awalnya berada di Deputy Bidang Administrasi berpindah ke Deputy Bidang Persidangan.

Sedangkan tahun 2020 dan 2022, persentase capaian jumlah unit kerja Eselon II yang telah menyusun *Risk Register* adalah sebesar 100% atau realisasi sesuai dengan target yang telah direncanakan.



Grafik 3.1 Progres Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020-2021

Faktor yang menjadi pendorong tercapainya target jumlah unit kerja Eselon II yang telah menyusun *Risk Register*, yaitu:

1. Telah dilakukannya revisi atas Penerapan Manajemen Risiko di Setjen DPR RI melalui Persekjen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Telah diciptakannya aplikasi Sistem Manajemen Risiko Instansi (SIMANIS) yang membantu unit kerja dalam menyusun *Risk Register*.
  3. Pendampingan secara intensif dari Auditor kepada unit pemilik risiko dan unit manajemen risiko dalam melakukan *updating* atas *Risk Register*.
- 1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra untuk melihat posisi di tahun ini**

**Tabel 3.7**

**Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun <i>Risk Register</i>	11 unit kerja	10 unit kerja	110%

Dari tabel di atas capaian indikator kinerja “Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun *Risk Register*” pada tahun 2022 sebesar 11 (sebelas) unit kerja. Realisasi indikator kinerja tahun 2022 bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 adalah 110% atau meningkat dari target yang telah ditetapkan. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi sesuai Persekjen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia dimana Biro Protokol dan Humas yang pada awalnya berada di Deputi Bidang Administrasi berpindah ke Deputi Bidang Persidangan.

**1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Terkait perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan karena tidak terdapat perbandingan antara indikator kinerja Inspektorat II dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.

**1.5. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

**Tabel 3.8  
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun <i>Risk Register</i>	11 unit kerja	11 unit kerja	100%	Faktor penyebab keberhasilan, yaitu: a. Telah dilakukannya revisi atas Penerapan Manajemen Risiko di Setjen DPR RI melalui Persekjen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;	a. Melakukan evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko di Setjen DPR RI melalui Persekjen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; b. Evaluasi aplikasi Sistem Manajemen Risiko Instansi (SIMANIS) yang membantu unit kerja dalam menyusun

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

						<p>b. Telah diciptakannya aplikasi Sistem Manajemen Risiko Instansi (SIMANIS) yang membantu unit kerja dalam menyusun <i>Risk Register</i>;</p>	<p><i>Risk Register</i>;</p> <p>c. Melakukan pendampingan kepada PKORB dalam hal pelaksanaan manajemen risiko.</p>
						<p>c. Pendampingan secara intensif dari Auditor kepada unit kerja dalam melakukan <i>updating</i> atas <i>Risk Register</i>.</p>	

**1.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 3.9**

**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II	Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun <i>Risk Register</i>	11 unit kerja	11 unit kerja	100%	Rp2.058.000,-	Rp2.058.000,-	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT II TAHUN 2022

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

program “Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II” dengan indikator kinerja “Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun *Risk Register*” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Sasaran program dengan indikator kinerja tersebut di atas sudah mencapai target dengan capaian sebesar 100% dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 100%.

## 1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat II selama tahun 2022 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun *Risk Register*”, yaitu :

- Pendampingan penyusunan Risk Register Eselon I dan Eselon II di lingkup Pengawasan Inspektorat II;
- Forum Group Discussion (FGD) Risk Register.*

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status	Prosedur atau Is
1	Meningkatnya kualitas dukungan pengawasan/bantuan teknis kepada Eselon II yang menyusun anggaran belanja Negara dan Kinerja dengan Fungsi K/L yang Pengawasan dan Observasi oleh Fungsi Anggaran DPR	Persentase kualitas dukungan pengawasan/bantuan teknis kepada Eselon II yang menyusun anggaran belanja Negara dan Kinerja dengan Fungsi K/L yang Pengawasan dan Observasi oleh Fungsi Anggaran DPR	Terdapat tanggapan/kegiatan/kegiatan (bantuan/teknis)	Agenda pembahasan yang hasilkan (bantuan/teknis)	Perencanaan anggaran LRP SPA ke DPR oleh Fungsional/kegiatan	Risiko Operasional	3	2	8	Mendukung bahan/materi (R) secara es
2	Meningkatnya kualitas dukungan pengawasan/bantuan teknis kepada Eselon II yang menyusun anggaran belanja Negara dan Kinerja dengan Fungsi K/L yang Pengawasan dan Observasi oleh Fungsi Anggaran DPR	Persentase kualitas dukungan pengawasan/bantuan teknis kepada Eselon II yang menyusun anggaran belanja Negara dan Kinerja dengan Fungsi K/L yang Pengawasan dan Observasi oleh Fungsi Anggaran DPR	Output analisis yang dihasilkan	Agenda pembahasan yang hasilkan dengan jadwal yang ditetapkan	Perencanaan anggaran LRP SPA ke DPR RI tidak optimal	Risiko Operasional	2	2	4	1. Melakukan mekanisme proses pemd. JPRN dan L. 2. Menyusun sebagai bahan/tem. jemaat/bantuan dengan DPR



Gambar 3.2 Pendampingan penyusunan Risk Register Eselon I dan Eselon II

**2. Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapatkan predikat WBK.**

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi Pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Berikut adalah analisis capaian kinerja untuk indikator kinerja Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK :

**2.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja**

**Tabel 3.10**

**Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja**

<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
3 unit	3 unit	100%

Tahun 2022 Inspektorat II menargetkan unit kerja yang mendapatkan predikat WBK tahun 2022 berjumlah 3 (tiga) unit kerja. Realisasi unit kerja yang ditetapkan mendapatkan predikat WBK sampai dengan tahun 2022 berjumlah 3 (tiga) unit kerja atau 100%.

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT II TAHUN 2022

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB Nomor B/255/PW.04/2020 tanggal 30 Desember 2020 bahwa Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional mendapatkan predikat WBK. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB Nomor B/332/PW.04/2021 tanggal 30 Desember tahun 2021 bahwa Pusat Kajian Anggaran dan Biro Persidangan II mendapatkan predikat WBK. Sehingga realisasi unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang telah mendapatkan predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sampai dengan tahun 2022 berjumlah 3 (tiga) unit kerja, yaitu Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, Pusat Kajian Anggaran dan Biro Persidangan II.

Pada tahun 2022 Inspektorat II mengusulkan sebanyak 2 (dua) unit kerja untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yaitu Biro Kesekretariatan Pimpinan dan Pusat Perancangan Undang – Undang. Pengajuan Evaluasi ZI telah dilakukan oleh Inspektorat II melalui website [pmpzi.menpan.go.id](http://pmpzi.menpan.go.id). Atas pengajuan Evaluasi tersebut, telah dilakukan Evaluasi Zona Integritas oleh Tim Penilai Nasional (TPN) pada tanggal 3 Oktober 2022. Namun hingga 30 Desember tahun 2022, Inspektorat II belum mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi ZI tahun 2022.

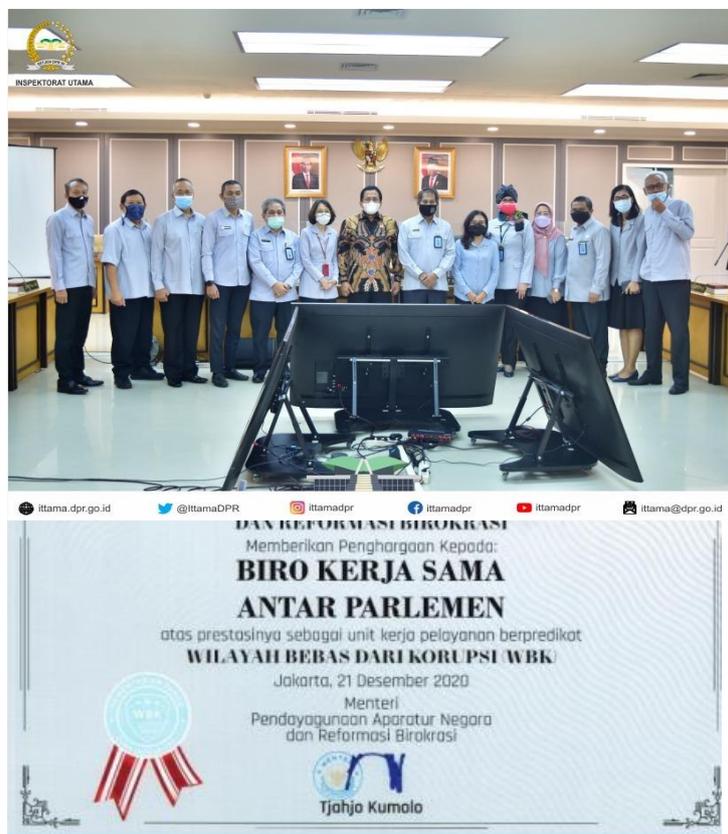


# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT II TAHUN 2022

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Gambar 3.3 Piagam penetapan WBK tahun 2022

Gambar 3.4 Piagam penetapan WBK tahun 2021



Gambar 3.5 Penyerahan Piagam ZI oleh Sekjen DPR RI

## 2.2. Perbandingan Capaian kinerja beberapa tahun

Tabel 3.11 Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK	1 unit	1 unit	100%	2 unit	3 unit	150%	3 unit	3 unit	100%

Berdasarkan data perbandingan capaian kinerja terkait indikator kinerja jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapatkan predikat WBK pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Tahun 2020 terdapat target 1 (satu) unit kerja yang diajukan untuk mendapatkan predikat WBK dan realisasi tahun 2020 sebanyak 1 (satu) unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBK, yaitu Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional. Tahun 2021 terdapat target 2 (dua) unit kerja yang diajukan untuk mendapatkan predikat WBK dan realisasi sampai dengan tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) unit kerja telah mendapatkan predikat WBK, yaitu Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, Pusat Kajian Anggaran dan Biro Persidangan II. Tahun 2022 terdapat target 2 (dua) unit kerja yang diajukan untuk mendapatkan predikat WBK dari 3 (tiga) unit yang ditargetkan, dikarenakan target unit kerja yang memperoleh WBK sudah terpenuhi di tahun 2021. Realisasi yang telah mendapatkan predikat WBK sampai dengan tahun 2022 masih sebanyak 3 (tiga) unit kerja atau tidak mengalami kenaikan.



Grafik 3.2 Progres Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

**2.3. Perbandingan Capaian kinerja beberapa tahun**

**Tabel 3.12**

**Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK	3	5	60%

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra Setjen DPR RI 2020 – 2024), diketahui bahwa indikator kinerja “Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK” sampai dengan tahun 2022 telah tercapai 3 (tiga) unit kerja. Sedangkan target akhir Renstra Setjen DPR RI tahun 2024 untuk indikator kinerja tersebut adalah sebanyak 5 (lima) unit. Sehingga target yang harus dicapai oleh Inspektorat II sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 2 (dua) unit kerja. Sehingga Inspektorat II telah melakukan pembinaan terhadap unit kerja yang akan diajukan menjadi Zona Integritas WBK, mendorong komitmen Pimpinan unit kerja untuk melakukan pembangunan Zona Integritas WBK dan melakukan evaluasi hasil penilaian mandiri.

Upaya yang akan dilakukan Inspektorat II untuk mencapai target akhir sesuai Renstra Setjen DPR RI tahun 2020 – 2024, yaitu dengan melakukan pembinaan berupa pendampingan kepada seluruh unit eselon II yang ditetapkan sebagai unit kerja pembangunan ZI WBK/WBBM di lingkup tugas Inspektorat II, serta menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kemenpan RB.

## 2.4. Perbandingan Capaian kinerja dengan Standar Nasional (K/L)

**Tabel 3.13**

**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional (K/L)**

Kementerian/Lembaga	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3		4	5		6	7
Inspektorat II	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK	2 unit	3 unit	150%	3 unit	3 unit	100%
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tahun 2021	Pembangunan Zona Integritas	Pembangunan Zona Integritas	12 unit	2 unit	16,67%	15 unit	4 unit	26,67%

Berdasarkan data tabel perbandingan capaian dengan standar nasional (K/L) diatas, standar K/L adalah perbandingan dengan standar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Standar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada tahun 2021 untuk Pembangunan ZI di Satker Pusat dan Perwakilan RI sebanyak 15 (lima belas) unit kerja.

Jika dibandingkan dengan kementerian/lembaga lain, persentase capaian realisasi indikator kinerja Inspektorat II Sekretariat Jenderal DPR RI mengalami penurunan sebesar 33,33%. Dari tabel di atas, realisasi indikator kinerja dari Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri tidak terpenuhi, namun persentase capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri mengalami kenaikan.



Grafik 3.3 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

## 2.5. Perbandingan Analisis penyebab keberhasilan

**Tabel 3.14 Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK	3 unit	3 unit	100%	Faktor penyebab keberhasilan, yaitu: a. Komitmen dari unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas WBK; b. Inspektorat II telah melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan terhadap unit kerja yang akan diajukan menjadi Zona Integritas WBK dan melakukan evaluasi hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh unit kerja.	Melakukan pembinaan berupa pendampingan kepada seluruh unit Eselon II untuk Pembangunan Unit ZI WBK/WBBM di lingkup tugas Inspektorat II, dalam beberapa kegiatan yaitu : a. <i>Updating</i> LKE dan eviden PMPZI; b. Meningkatkan kualitas inovasi atas pelayanan public ( <i>core business</i> );

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

								<p>c. Melakukan koordinasi dalam pengumpulan dan pengkoordinasian responden atas survei Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);</p> <p>d. Mempersiapkan pelaksanaan evaluasi lapangan oleh Kementerian PAN RB</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**2.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

**Tabel 3.15**

**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT II TAHUN 2022

## INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

1	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK	3	3	100%	3.430.000	3.430.000	100%
---	---	--	---	---	------	-----------	-----------	------

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II” dengan indikator kinerja “Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Indikator kinerja, sudah mencapai target dengan capaian sebesar 100% dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 100%.

### 2.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat II selama tahun 2022 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK”, antara lain:

1. Komitmen dari unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas WBK;
2. Pendampingan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada seluruh unit eselon II untuk Pembangunan Unit ZI WBK/WBBM di lingkup tugas Inspektorat II;
3. Bimtek/*Workshop* tentang Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada seluruh unit eselon II.

### 3. Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II.



Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menetapkan bahwa setiap Penyelenggara Negara termasuk pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya. LHKPN pada prinsipnya merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh Penyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya. Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan LHKPN di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Pasal 5, Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut:

- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- Pejabat Pembuat Komitmen;
- Kepala Unit Layanan Pengadaan;
- Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- Bendahara; dan

h. Auditor.

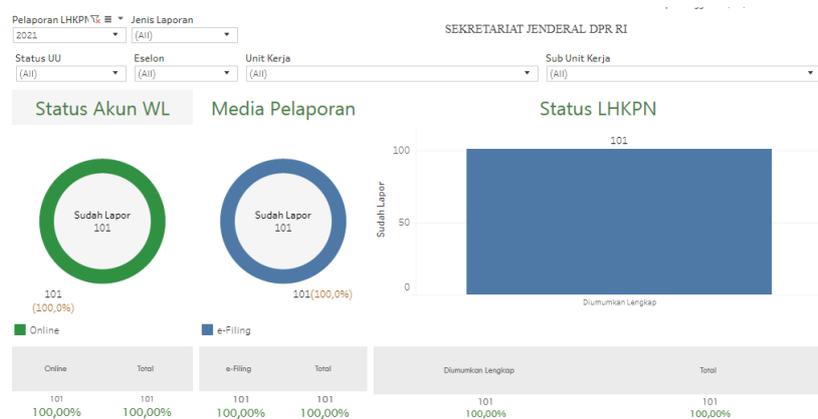
**3.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II**

**Tabel 3.16**

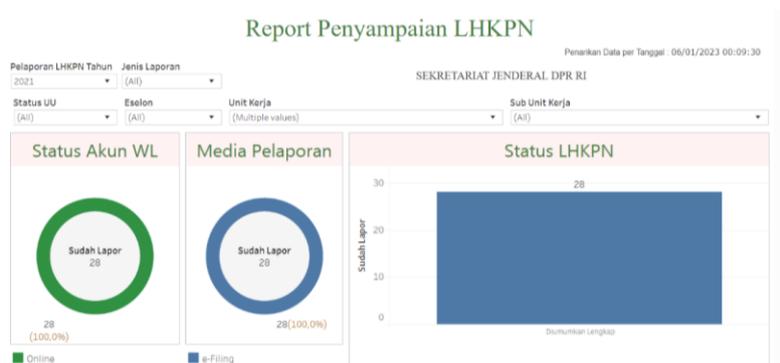
**Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja**

Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, diketahui target yang ingin dicapai pada indikator “Tingkat Kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II” pada Tahun 2022 adalah sebesar 100%, dan telah terealisasi sebesar 100%, sehingga diperoleh nilai capaian 100%.



**Gambar 3.6 Laporan Penyampaian E-LHKPN**



**Gambar 3.7 Report Penyampaian LHKPN**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Terdapat 28 (dua puluh delapan) pegawai yang tercatat sebagai wajib lapor LHKPN di aplikasi E-LHKPN. Tahun 2022 dan Inspektorat II sebagai bagian dari Inspektorat Utama turut bertanggung jawab untuk memonitor pelaksanaan LHKPN tersebut. Hasil pengukuran tersebut diperoleh dari data berikut:

Tabel 3.17 Data Pengukuran Tingkat Kepatuhan LHKPN

No	Unit Kerja	2021					2022				
		Wajib Lapor	Sudah Lapor	Pelaporan	Target	Capaian	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Pelaporan	Target	Capaian
1	Badan Keahlian	9	9	100%	100%	100%	12	12	100%	100%	100%
2	Deputi Bidang Persidangan	11	11	100%	100%	100%	16	16	100%	100%	100%
Total		20	20	100%	100%	100%	28	28	100%	100%	100%

**3.2. Perbandingan Capaian kinerja beberapa tahun Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II**

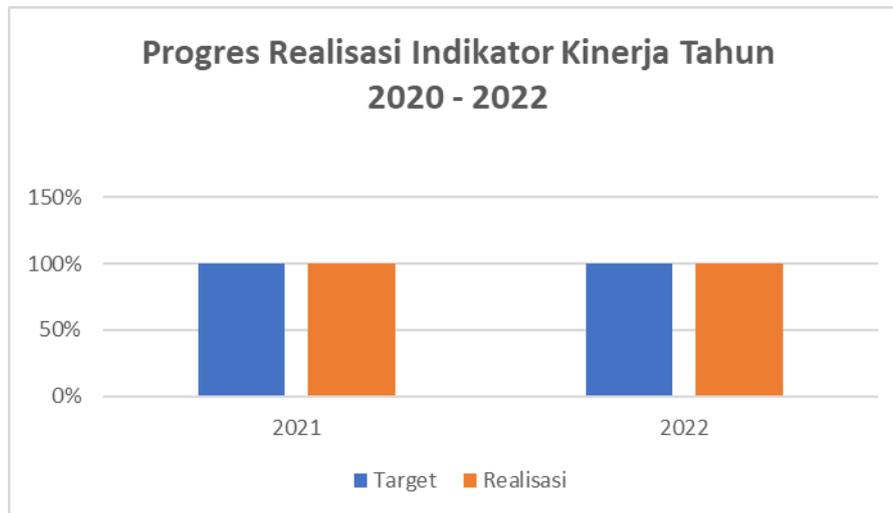
Tabel 3.18

**Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	Tingkat Kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir, diketahui bahwa indikator kinerja “Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II” belum ada di tahun 2020 dan baru ada di tahun 2021.

Target tahun 2021 dan tahun 2022 tetap, dikarenakan nilai 100% adalah nilai tertinggi dari pencapaian tingkat kepatuhan LHKPN.



Grafik 3.4 Progres Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020-2022

### 3.3. Perbandingan Capaian kinerja beberapa tahun Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II dengan target jangka menengah

**Tabel 3.19**

#### Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	Tingkat Kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra Setjen DPR RI 2020 – 2024), diketahui bahwa indikator kinerja “Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II” pada tahun 2022 telah tercapai 100%. Sedangkan target pada Renstra Setjen DPR RI tahun 2024 untuk indikator kinerja tersebut adalah sebesar 100%.

Target untuk tingkat Kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II adalah target tahunan yang disesuaikan dengan jumlah wajib lapor. Untuk tahun 2021 dan tahun 2022 tingkat Kepatuhan

LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II telah sesuai dengan jumlah wajib lapor atau tercapai 100%. Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja, Inspektorat II akan melakukan pemantauan, bersama KPK dengan melakukan asistensi pelaporan e-LHKPN. Inspektorat II juga menjalankan peran konsultasi dan terus meningkatkan koordinasi dengan KPK.

### **3.4. Perbandingan Capaian kinerja dengan Standar Nasional (K/L) Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II**

Terkait perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan perbandingan dikarenakan tidak terdapat perbandingan antara indikator kinerja Inspektorat II dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.

### **3.5. Perbandingan Analisis penyebab keberhasilan Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II**

**Tabel 3.20**

**Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Upaya yang Dilakukan
1	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	Tingkat Kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%	Faktor penyebab keberhasilan, yaitu: a. Inspektorat II telah membuat tim untuk pemantuan dan pendampingan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkup tugas Inspektorat II. b. Inspektorat II melakukan koordinasi dengan Bagian Administrasi Inspektorat Utama dan KPK.	Sosialisasi pengisian LHKPN.

### **3.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Terkait analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tidak ada penggunaan anggaran pada kegiatan pemantauan dan pendampingan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkup tugas Inspektorat II.

### **3.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat II selama tahun 2022 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Tingkat Kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II”, antara lain:

- a. Pemantuan dan pendampingan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkup tugas Inspektorat II;
- b. Inspektorat II melakukan koordinasi dengan Bagian Administrasi Inspektorat Utama dan KPK;
- c. Sosialisasi pengisian LHKPN.

## **4. Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II.**



LHKASN diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Instansi Pemerintah. Latar belakang dikeluarkannya peraturan untuk mengisi

LHKASN adalah untuk mencegah KKN, mencegah penyalahgunaan wewenang, mewujudkan transparansi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan penguatan integritas ASN. LHKASN berisikan daftar seluruh harta kekayaan ASN beserta anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan, dan wajib dilengkapi oleh seluruh ASN terkecuali untuk para pejabat yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN. Kewajiban pengisian LHKASN juga diatur dalam Peraturan Kemenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

#### **4.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II**

**Tabel 3.21**

##### **Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja**

<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
100%	100%	100%

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, diketahui target yang ingin dicapai pada indikator “Tingkat Kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II” pada Tahun 2022 adalah sebesar 100%, dan telah terealisasi sebesar 100%, sehingga diperoleh nilai capaian 100%.

**Tabel 3.22**

##### **Perbandingan wajib LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II**

<b>Unit kerja</b>	<b>Wajib lapor</b>	<b>Sudah lapor</b>	<b>Belum lapor</b>	<b>Capaian (%)</b>
Deputi Persidangan	488	488	0	100%
Badan Keahlian	197	197	0	100%

#### **4.2. Perbandingan Capaian kinerja beberapa tahun Tingkat kepatuhan**

**LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II**

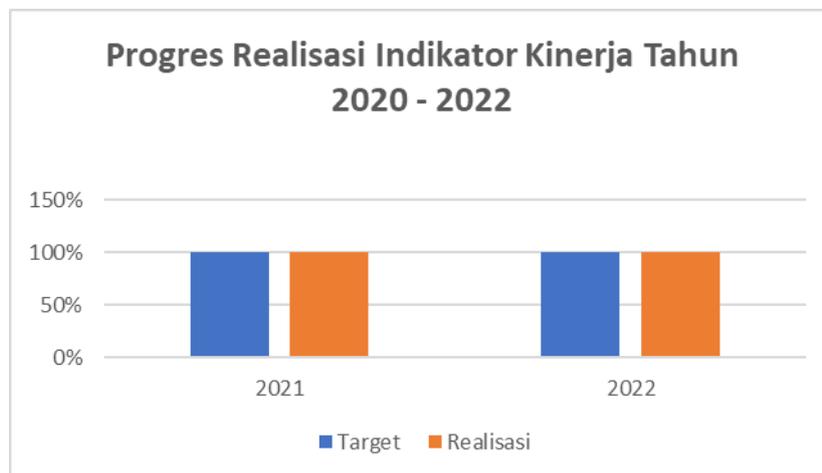
**Tabel 3.23**

**Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	Tingkat Kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Indikator perbandingan capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir, diketahui bahwa Indikator kinerja “Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II” belum ada di tahun 2020 dan baru ada di tahun 2021.

Target tahun 2021 dan tahun 2022 tetap, dikarenakan nilai 100% adalah nilai tertinggi dari pencapaian tingkat kepatuhan LHKASN.



Grafik 3.5 Progres Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020-2022

**4.3. Perbandingan Capaian kinerja beberapa tahun Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II**

**Tabel 3.24**

**Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	Tingkat Kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra Setjen DPR RI 2020 – 2024), diketahui bahwa indikator kinerja “Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II” pada tahun 2022 telah tercapai 100%. Sedangkan target pada Renstra Setjen DPR RI tahun 2024 untuk indikator kinerja tersebut adalah sebesar 100%.

Target untuk tingkat Kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II adalah target tahunan yang disesuaikan dengan jumlah wajib lapor. Untuk tahun 2021 dan tahun 2022 tingkat Kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II telah sesuai dengan jumlah wajib lapor atau tercapai 100%.

**4.4. Perbandingan Capaian kinerja dengan Standar Nasional (K/L)  
Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II**

Terkait perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan perbandingan dikarenakan tidak terdapat perbandingan antara indikator kinerja Inspektorat II dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.

**4.5. Perbandingan Analisis penyebab keberhasilan Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II**

**Tabel 3.25**

**Analisis penyebab keberhasilan**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	Tingkat Kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%	Faktor penyebab keberhasilan, yaitu: a. Inspektorat II telah membuat tim untuk pemantuan dan pendampingan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkup tugas Inspektorat II; b. Inspektorat II melakukan koordinasi dengan Bagian Administrasi Inspektorat Utama.	Sosialisasi pengisian LHKASN.

**4.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

**Tabel 3.26**

**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	Tingkat Kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%	970.200	970.200	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II” dengan indikator kinerja “Tingkat Kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Indikator kinerja, sudah mencapai target dengan capaian sebesar 100% dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 100%.

#### 4.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat II selama tahun 2022 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Tingkat Kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II”, yaitu :

- a. Pemantuan dan pendampingan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkup tugas Inspektorat II;
- b. Inspektorat II melakukan koordinasi dengan Bagian Administrasi Inspektorat Utama;
- c. Sosialisasi pengisian LHKASN.

#### 5. Persentase realisasi anggaran Inspektorat II



##### 5.1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

**Tabel 3.27**

**Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja**

Target	Realisasi	Capaian
92,5%	100%	108%

Pada Tahun Anggaran 2022, Inspektorat II Sekretariat Jenderal

DPR RI merealisasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebesar Rp1.405.893.906,- (satu milyar empat ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah) atau mencapai 100% dari pagu anggaran sebesar Rp1.405.896.000,- (satu milyar empat ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp2.094 (dua ribu sembilan puluh empat rupiah), sehingga apabila dihubungkan dengan target yang ingin dicapai pada indikator “Persentase realisasi anggaran Inspektorat II” pada Tahun 2022, diperoleh nilai capaian realisasi anggaran sebesar 108%.

**5.2. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Capaian kinerja dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut:

**Tabel 3.28**

**Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

<b>Tahun</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>
2020	Rp753.142.000	Rp744.456.000
2021	Rp1.079.012.000	Rp1.075.534.952
2022	Rp1.405.893.906	Rp1.405.893.906



Grafik 3.6 Perbandingan Realisasi Anggaran 2020-2022

Inspektorat II melaksanakan program dan kegiatan pengawasan pada tahun 2022 didukung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.405.896.000,- (satu milyar empat ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Pagu Anggaran Inspektorat II tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (DIPA 2021) sebesar Rp1.079.012.000,- (satu milyar tujuh puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah) maka terdapat kenaikan yang signifikan sebesar Rp326.884.000,- (tiga ratus juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau naik sebesar 30%.

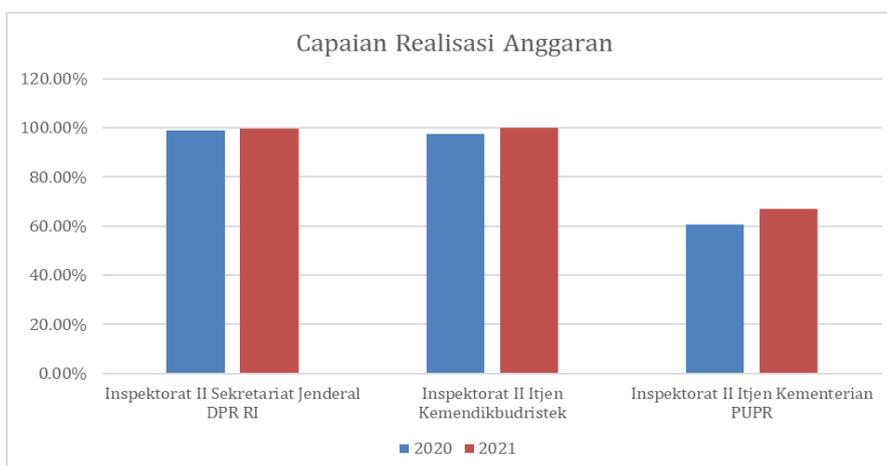
Berdasarkan grafik dan tabel di atas, terdapat penurunan target persentase realisasi anggaran dari tahun 2020 ke 2021, sementara target persentase realisasi anggaran yang ditetapkan pada tahun 2022 masih sama dengan target tahun 2021. Dengan kondisi demikian, capaian target tetap meningkat di setiap tahunnya.

### **5.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

**Tabel 3.29**

**Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan K/L lain**

Kementerian/ Lembaga	2020			2021		
	Pagu	Realiasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Inspektorat II Sekretariat Jenderal DPR RI	753.142.000	744.456.000	98,85%	1.079.012.000	1.075.534.952	99,68%
Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek	1.584.428.000	11.297.349.347	97,52%	16.060.387.000	16.049.335.473	99,93%
Inspektorat II Itjen Kementerian PUPR	3.025.241.000	1.838.741.479	60,78%	2.726.898.000	1.822.674.824	66,84%



Grafik 3.7 Perbandingan capaian realisasi anggaran dengan K/L lain

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, pada tahun 2020 dan 2021, Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek mencapai 99,93% dan Inspektorat II Itjen Kementerian PUPR mencapai 66,84%.

Berdasarkan data di atas, capaian persentase realisasi anggaran tahun 2020, Inspektorat II Sekretariat Jenderal DPR RI berada di atas Inspektorat II Itjen Kementerian PUPR dan Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek. Pada tahun 2021 berada di atas Inspektorat II Itjen Kementerian PUPR, namun masih berada di bawah Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek.

Merujuk pada PMK Nomor 195/PMK.05/2018, Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT II TAHUN 2022

## INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

yang mengukur kesesuaian dengan perencanaan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi, dimana salah satu data dan informasi yang diperlukan adalah terkait penyerapan dari sisi anggaran.

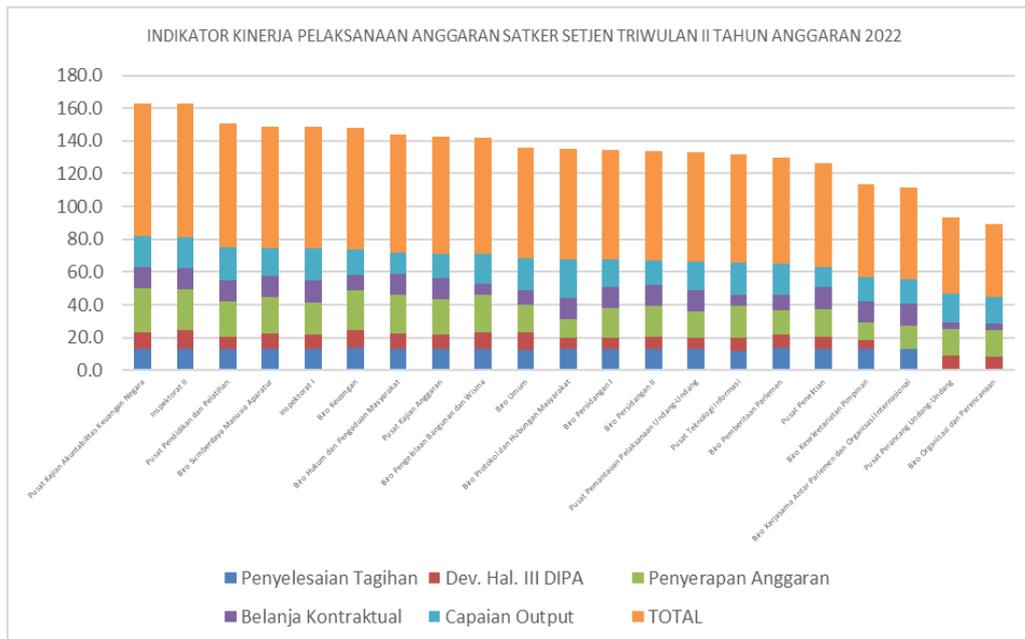
Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2022, Inspektorat II Sekretariat Jenderal DPR RI memperoleh penghargaan atas “Raihan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik II Satker Sekretariat Jenderal DPR RI Triwulan II Tahun Anggaran 2022”, berdasarkan hasil penilaian IKPA Satker Sekretariat Jenderal sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

**Tabel 3.30**  
**IKPA Satker Setjen Triwulan II Tahun Anggaran 2022**

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER SETJEN							
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022							
No.	Unit Kerja	Penyelesaian Tagihan	Dev. Hal. III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Capaian Output	TOTAL
1	Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	13.0	9.77	27.00	13	18.77	81.54
2	Inspektorat II	13.0	11.64	24.63	13	19.02	81.28
3	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	13.0	7.60	21.38	13	20.33	75.31
4	Biro Sumberdaya Manusia Aparatur	13.0	9.39	22.35	13	16.66	74.39
5	Inspektorat I	13.0	8.92	19.66	13	19.74	74.31
6	Biro Keuangan	13.3	10.83	24.48	9.3	16.11	74.08
7	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	13.0	9.70	23.03	13	13.21	71.93
8	Pusat Kajian Anggaran	13.0	8.78	21.49	13	14.91	71.18
9	Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	12.8	10.18	23.08	6.8	18.09	71.04
10	Biro Umum	12.6	10.67	16.82	8.336	19.57	67.98
11	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat	13.0	6.50	11.45	13	23.63	67.58
12	Biro Persidangan I	13.0	6.99	17.71	13	16.66	67.37
13	Biro Persidangan II	13.0	7.28	19.11	13	14.44	66.83
14	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	13.0	6.66	16.16	13.0	17.64	66.46
15	Pusat Teknologi Informasi	11.8	7.72	20.00	6.4	19.86	65.72
16	Biro Pemberitaan Parlemen	13.3	8.34	14.89	9.3	19.00	64.90
17	Pusat Penelitian	13.0	7.37	17.17	13	12.62	63.17
18	Biro Kesekretariatan Pimpinan	13.0	5.69	10.44	13	14.50	56.62
19	Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	13.0	0.00	14.40	13	15.30	55.71
20	Pusat Perancang Undang-Undang	0.0	8.87	16.33	4	17.45	46.66
21	Biro Organisasi dan Perencanaan	0.0	7.94	16.44	4	16.16	44.53
		<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>27%</b>	<b>13%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>
	Bobot Indikator berdasarkan PER-PB/5/2022	10%	10%	20%	10%	25%	75%

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT II TAHUN 2022

## INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



Grafik 3.8 Perbandingan IKPA Satker Setjen Antar Eselon II Triwulan II Tahun Anggaran 2022

Penghargaan tersebut diberikan pada acara Sosialisasi dan Workshop Optimalisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DPR RI TA 2022 serta Penandatanganan Pakta Integritas yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 7 sampai dengan 8 September 2022.



Gambar 3.8 Penerimaan penghargaan IKPA Terbaik II Triwulan II Tahun 2022

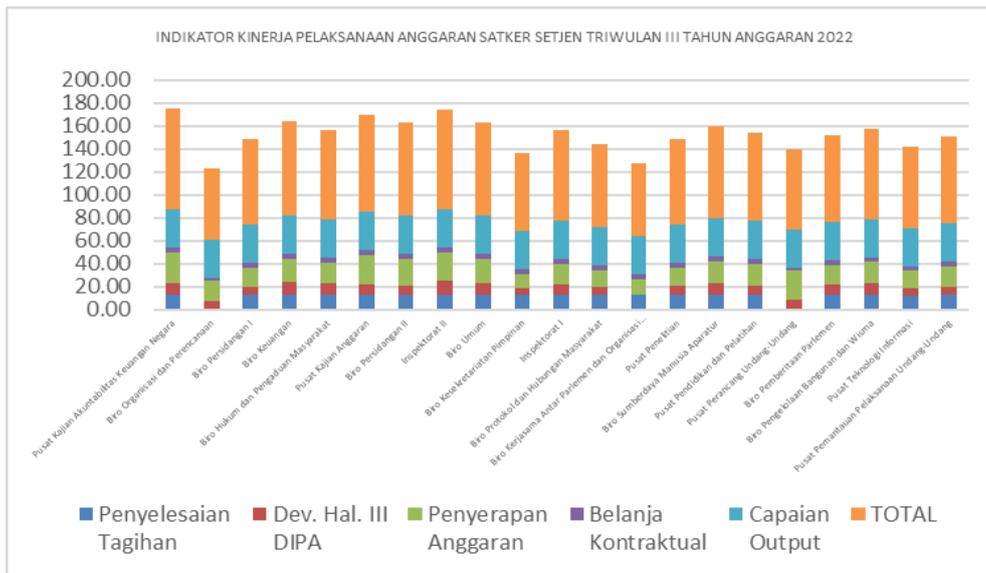
**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pada Triwulan III Tahun Anggaran 2022, Inspektorat II Sekretariat Jenderal DPR RI kembali memperoleh penghargaan atas “Raihan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik II Satker Sekretariat Jenderal DPR RI Triwulan III Tahun Anggaran 2022”, berdasarkan hasil penilaian IKPA Satker Sekretariat Jenderal sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

**Tabel 3.31**  
**IKPA Satker Setjen Triwulan II Tahun Anggaran 2022**

INDIKATOR KINERJA TRIWULAN							
No.	Unit Kerja	Penyelesaian Tagihan	Dev. Hal. III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Capaian Output	TOTAL
1	Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	13.33	9.77	26.67	4.40	33.33	87.50
2	Biro Organisasi dan Perencanaan	0.00	7.94	17.34	2.67	33.33	61.28
3	Biro Persidangan I	13.33	6.99	16.12	4.40	33.33	74.18
4	Biro Keuangan	13.33	10.83	20.01	4.40	33.33	81.91
5	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	13.33	9.70	17.59	4.40	33.33	78.35
6	Pusat Kajian Anggaran	13.33	8.78	25.25	4.40	33.33	85.09
7	Biro Persidangan II	13.33	7.28	23.17	4.40	33.33	81.51
8	Inspektorat II	13.33	11.64	24.56	4.40	33.33	87.27
9	Biro Umum	12.78	10.67	20.50	4.27	33.33	81.55
10	Biro Kesekretariatan Pimpinan	13.33	5.69	11.50	4.40	33.33	68.25
11	Inspektorat I	13.33	8.92	17.92	4.40	33.33	77.90
12	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat	13.33	6.50	14.68	4.40	33.33	72.24
13	Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	13.33	0.00	12.75	4.40	33.33	63.82
14	Pusat Penelitian	13.33	7.37	15.61	4.40	33.33	74.05
15	Biro Sumberdaya Manusia Aparatur	13.33	9.39	19.60	4.40	33.33	80.06
16	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	13.33	7.60	18.47	4.40	33.33	77.14
17	Pusat Perancang Undang-Undang	0.00	8.87	25.24	2.67	33.33	70.12
18	Biro Pemberitaan Parlemen	13.33	8.34	16.56	4.40	33.33	75.97
19	Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	12.95	10.18	18.54	3.73	33.33	78.74
20	Pusat Teknologi Informasi	11.52	7.72	14.89	3.87	33.22	71.21
21	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	13.33	6.66	17.79	4.40	33.33	75.52
		13%	13%	27%	13%	33%	100%
	Bobot Indikator berdasarkan PER-PB/5/2022	10%	10%	20%	10%	25%	75%



Grafik 3.9 Perbandingan IKPA Satker Setjen Antar Eselon II Triwulan III Tahun Anggaran 2022

Penghargaan tersebut diberikan pada acara Sosialisasi dan Workshop Langkah-Langkah Akhir Tahun yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 18 Oktober 2022.



Gambar 3.9 Penerimaan penghargaan IKPA Terbaik II Triwulan III Tahun 2022

#### **5.4. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra untuk melihat posisi di tahun ini**

Terkait dengan indikator persentase realisasi anggaran, tidak terdapat perbandingan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, karena indikator persentase realisasi anggaran tidak tercantum pada Renstra Setjen DPR RI 2020-2024.

**5.5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

**Tabel 3.32**

**Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Inspektorat II	Persentase realisasi anggaran Inspektorat II	92,5%	100%	108%	Faktor keberhasilan antara lain: 1. Evaluasi atas setiap capaian kinerja dan anggaran setiap triwulan. 2. Perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan atas mekanisme dan prosedur kerja. 3. Perbaikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta evaluasi dan koordinasi.	Segera mencari solusi untuk kegiatan yang belum maksimal capaian kinerja dan anggarannya.

**5.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian persentase realisasi anggaran yang berhasil melebihi target yang telah ditetapkan didukung oleh program dengan jenis belanja sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.32**

**Jenis belanja program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

No	Unit	MAK	Pagu	Realisasi	Sisa	Keterangan
1	7	WA.5793.EBA.962.051.A.521219	212.679.000	212.678.560	440	Belanja Barang Non Operasional Lainnya
2	7	WA.5793.EBA.962.051.A.522151	10.800.000	10.800.000	0	Belanja Jasa Profesi
3	7	WA.5793.EBA.962.051.A.522191	21.787.000	21.787.000	0	Belanja Jasa Lainnya

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

4	7	WA.5793.EBA.962.051.A.524111	260.023.000	260.022.761	239	Belanja Perjalanan Biasa
5	7	WA.5793.EBA.962.051.A.524114	215.522.000	215.522.000	0	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
6	7	WA.5793.EBA.962.051.B.524111	218.586.000	218.585.555	445	Belanja Perjalanan Biasa
7	7	WA.5793.EBA.962.052.A.521211	12.140.000	12.140.000	0	Belanja Bahan
8	7	WA.5793.EBA.962.052.B.521211	2.100.000	2.100.000	0	Belanja Bahan
9	7	WA.5793.EBD.953.051.C.521211	2.399.000	2.399.000	0	Belanja Bahan
10	7	WA.5793.EBD.965.051.A.521211	2.775.000	2.775.000	0	Belanja Bahan
11	7	WA.5793.EBD.965.051.B.521211	5.800.000	5.800.000	0	Belanja Bahan
12	7	WA.5793.EBD.965.051.C.521211	26.166.000	26.166.000	0	Belanja Bahan
13	7	WA.5793.EBD.965.051.C.522151	14.400.000	14.400.000	0	Belanja Jasa Profesi
14	7	WA.5793.EBD.965.051.C.524119	40.500.000	40.500.000	0	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
15	7	WA.5793.EBD.965.051.D.521211	21.291.000	21.290.030	970	Belanja Bahan
16	7	WA.5793.EBD.965.051.D.522151	24.300.000	24.300.000	0	Belanja Jasa Profesi
17	7	WA.5793.EBD.965.051.D.524114	84.360.000	84.360.000	0	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

18	7	WA.5793.EBD.965.051.D.524119	230.268.000	230.268.000	0	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
----	---	------------------------------	-------------	-------------	---	--

**5.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 3.33**

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	92,5%	100%	108%	Rp1.405.896.000	Rp1.405.893.906	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II” dengan indikator kinerja “persentase realisasi anggaran Inspektorat II” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Indikator kinerja, sudah mencapai target dengan capaian sebesar 100% dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 100%.

**6. Persentase Pemantauan Tindak Lanjut rekomendasi Pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II**



### 6.1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK di lingkup tugas Inspektorat II adalah sebesar 70%, dengan realisasi 90,91% atau persentase capaian sebesar 129,87%.

Tabel 3.34 Perbandingan Target dan Realisasi

Target	Realisasi	Capaian
70%	90,91%	129,87%

Hasil pengukuran diatas diperoleh dari data berikut :

**Tabel 3.35**  
**Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK**

LHP	Jml Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						% Jumlah Rekomendasi Telah Sesuai	% Jumlah Rekomendasi Belum Sesuai	% Nilai Rekomendasi Telah Sesuai	% Nilai Rekomendasi Belum Sesuai
			Sesuai		Belum Sesuai		Jml Belum Ditindaklanjuti	Jml Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
	ITDA		ITDA		ITDA	ITDA			ITDA	ITDA		
	ITDA	Nilai	Jml	Nilai			Jml	Nilai				
LK 2007	4	-	4	-	0	-	0	0	100%			
PDTT 2010	1	28.530.000	1	28.530.000	0	-	0	0	100%		100%	

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

**INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

LK 2011	1	99.717.800	1	99.717.800	0	-	0	0	100%		100%	
PDTT 2013	3	179.802.550	2	179.802.550	1	-	0	0	67%	33%	100%	0%
LK 2014	3		3	-	0	-	0	0	100%			
LK 2017	1		1	-	0	-	0	0	100%			
PDTT 2019	8		7	-	1	-	0	0	88%	13%		
LK 2020	1		1		0		0	0	100%			
<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>308.050.350</b>	<b>20</b>	<b>308.050.350</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,91%</b>	<b>9,09%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>

Dari data diatas diketahui bahwa dari Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut BPK terdapat 22 (dua puluh dua) rekomendasi, dengan nilai temuan sejumlah Rp308.050.350 (tiga ratus delapan juta lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Dengan rincian 20 (dua puluh) rekomendasi yang berstatus telah sesuai, dengan nilai sesuai sebesar Rp308.050.350 (tiga ratus delapan juta lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan terdapat 2 (dua) rekomendasi yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut.

Keberhasilan capaian realisasi atas pemantauan tindak lanjut pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II dikarenakan koordinasi yang intensif dengan unit kerja penanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut serta verifikasi kelengkapan dan keakuratan data dukung oleh Auditor Inspektorat II.

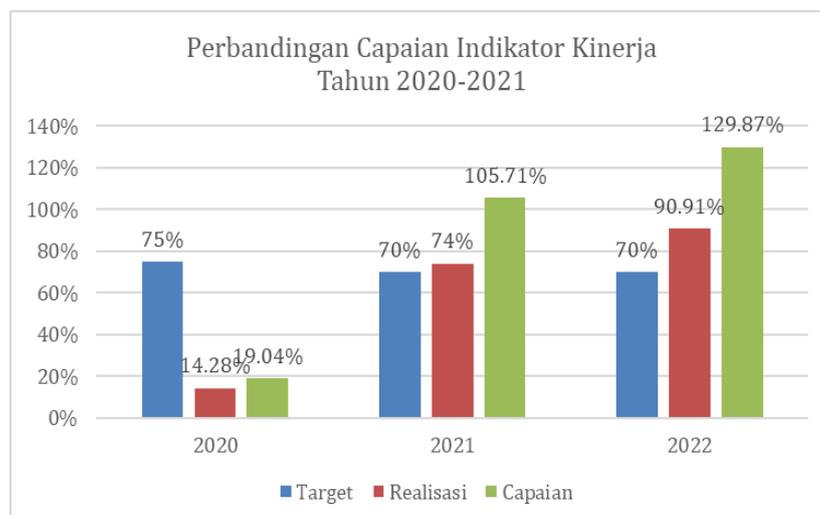
**6.2. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

**Tabel 3.36**

**Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II	Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK di lingkup tugas Inspektorat II	75%	14,28%	19,04%	70%	74%	105,71%	70%	90,91%	129,87%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, seperti tersaji pada tabel di atas, capaian persentase Pemantauan Tindak Lanjut rekomendasi BPK di lingkup tugas Inspektorat II pada tahun 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan tren kenaikan. Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir di atas diketahui bahwa capaian realisasi mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan persentase kenaikan tahun 2020-2021 sebesar 455,20% dan persentase kenaikan tahun 2021-2022 sebesar 22,85%.



Grafik 3.10 Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2020-2021

Faktor yang menjadi pendorong tercapainya target persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II, yaitu koordinasi yang intensif dengan unit kerja penanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut serta verifikasi kelengkapan dan keakuratan data dukung oleh Auditor Inspektorat II.

**6.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra untuk melihat posisi di tahun 2022.**

**Tabel 3.37  
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II	Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	90,91%	75%	121,21%

Dari tabel di atas capaian indikator kinerja “Persentase Pemantauan Tindak Lanjut rekomendasi Pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II” pada tahun 2022 sebesar 90,91%. Realisasi indikator kinerja tahun 2022 bila dibandingkan dengan target periode

akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 adalah 121,21% atau meningkat dari target yang telah ditetapkan. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya koordinasi yang intensif dengan unit kerja penanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut serta verifikasi kelengkapan dan keakuratan data dukung oleh Auditor Inspektorat II.

#### 6.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

**Tabel 3.38**

**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional**

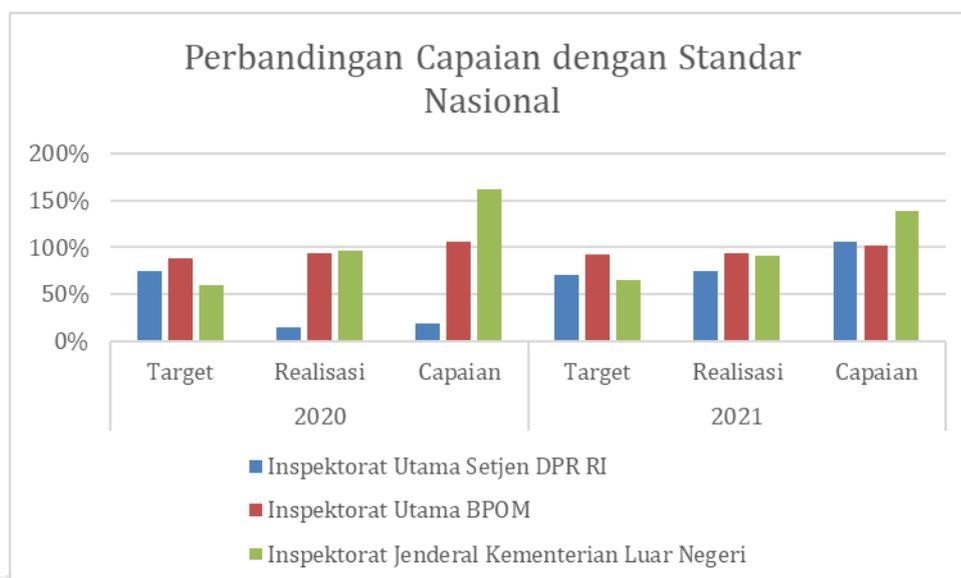
Kementerian/Lembaga	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat II Setjen DPR RI	Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	75%	14,28%	19,04%	70%	74%	105,71%
Inspektorat Utama BPOM	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	88%	93,47%	106,22%	92,5%	94,24%	101,90%

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Kementerian/Lembaga	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti unit organisasi, satuan kerja dan perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II	60%	96,75%	161,25%	65%	90,32%	138,95%

Berdasarkan data di atas, jika dibandingkan dengan kementerian/lembaga lain, persentase capaian realisasi indikator kinerja Inspektorat II Sekretariat Jenderal DPR RI mengalami kenaikan, dengan persentase kenaikan mencapai 455,20%. Dari tabel di atas, meskipun realisasi indikator kinerja dari Inspektorat Utama BPOM dan Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri terpenuhi, persentase capaian kinerja kedua kementerian/lembaga tersebut mengalami penurunan.



Grafik 3.11 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

**6.5. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

**Tabel 3.39**

**Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II	Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	70%	90,91%	129,87%	Faktor penyebab keberhasilan, antara lain:	Untuk mencapai target yang ditetapkan upaya yang dilakukan yaitu:
						a. Telah dilakukan koordinasi yang intensif dengan unit kerja penanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut serta verifikasi kelengkapan dan keakuratan data dukung oleh Auditor Inspektorat II.	a. Mendorong optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK seperti yang tertuang di dalam Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Pengawasan/ Pemeriksaan BPK dan APIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

								b. Menyusun rencana aksi, membangun komunikasi intensif dengan auditi terkait membuat kajian, dan melakukan kegiatan cek fisik turun langsung ke lapangan.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**6.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 3.40**

**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II	Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK di lingkup tugas Inspektorat II	70%	90,91%	129,87%	Rp2.399.000,-	Rp2.399.000,-	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II” dengan indikator kinerja “Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Sasaran program dengan indikator kinerja tersebut di atas sudah mencapai target dengan

capaian sebesar 129,87% atau meningkat sebesar 22,85% dari tahun 2021 dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 100%.

### **6.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat II selama tahun 2022 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II”, antara lain:

- a. Pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup pengawasan Inspektorat II;
- b. Pendampingan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK kepada unit kerja di lingkup pengawasan Inspektorat II.



Gambar 3.10 Pendampingan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK

## 7. Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II .



### 7.1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi APIP di lingkup tugas Inspektorat II adalah sebesar 50%, dengan realisasi 83,51% atau persentase capaian sebesar 167,02%.

**Tabel 3.41**  
**Perbandingan Target dan Realisasi**

Target	Realisasi	Capaian
50%	83,52%	167,04%

Hasil pengukuran diatas diperoleh dari data berikut :

**Tabel 3.42  
Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**

Tahun	Jml	Nilai Rekomendasi Temuan	Sesuai Dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti Dengan Alasan Yang Sah		Berdasarkan Jumlah Rekomendasi				% TOTAL
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	% Selesai	% Belum Sesuai	% Belum Ditindaklanjuti	% Tidak dapat ditindaklanjuti	
<b>INSPEKTORAT II</b>															
2018	11	97.834.000	11	97.834.000	0	-	0	-			100	0	0	0	
2019	29	3.097.720	26	3.097.720	0	-	0	-	3		89,66	0	0	0	
2020	1	-	1	-	0	-	0	-			100	0	0	0	
2021	38	325.992.897	22	105.000.000	15	220.992.897	0	-	1		57,89	39,47	0	2,63	
2022	12		11		0		0		1						
<b>Jumlah</b>	<b>91</b>	<b>426.924.617</b>	<b>71</b>	<b>205.931.720</b>	<b>15</b>	<b>220.992.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>78,02</b>	<b>16,48</b>	<b>0</b>	<b>5,49</b>	<b>83,52</b>

Dari data diatas diketahui bahwa dari Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut APIP terdapat 91 (sembilan puluh satu) rekomendasi, dengan nilai temuan sejumlah Rp426.924.617,- (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah). Dengan rincian 71 (tujuh puluh satu) rekomendasi yang berstatus telah sesuai, dengan nilai sesuai sebesar Rp205.931.720,- (dua ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan terdapat 15 (lima belas) rekomendasi yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut, dengan nilai sejumlah Rp220.992.897,- (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

## **7.2. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**Tabel 3.43**

**Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II	Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi APIP di lingkup tugas Inspektorat II	-	-	-	70%	65,31%	93,3%	50%	83,52%	167,04%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir di atas diketahui bahwa indikator kinerja “Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP” belum ada pada tahun 2020 dan baru ada di tahun 2021.

Capaian realisasi mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan persentase kenaikan sebesar 79,03%. Target capaian tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan mengikuti penyesuaian target nilai realisasi indikator kinerja “Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP” pada Inspektorat Utama yang tidak berhasil dalam mencapai target pada tahun 2021 dengan nilai hanya sebesar 46,59% dari target yang ditetapkan sebesar 70%.



Grafik 3.12 Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2020-2021

Faktor yang menjadi pendorong tercapainya target persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II, yaitu:

- a. Adanya koordinasi yang intensif dengan unit kerja penanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut serta verifikasi kelengkapan dan keakuratan data dukung oleh Auditor Inspektorat II.
- b. Peningkatan kompetensi auditor sehingga rekomendasi yang diberikan kepada auditan lebih jelas dan tidak multitafsir serta lebih sesuai dengan kebutuhan akan perbaikan yang dibutuhkan oleh organisasi. Hal ini akan mendorong unit kerja untuk dapat lebih cepat dalam melaksanakan tindak lanjut terhadap suatu rekomendasi.

**7.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra untuk melihat posisi di tahun ini**

**Tabel 3.44 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II	Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II	83,52%	75%	111,36%

Dari tabel di atas capaian indikator kinerja “Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II” pada tahun 2022 sebesar 83,52%. Realisasi indikator kinerja tahun 2022 bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 adalah 111,36% atau telah tercapai dari target yang ditetapkan. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya koordinasi yang intensif dengan unit kerja penanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut serta verifikasi kelengkapan dan keakuratan data dukung oleh Auditor Inspektorat II dan peningkatan kompetensi auditor.

#### 7.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

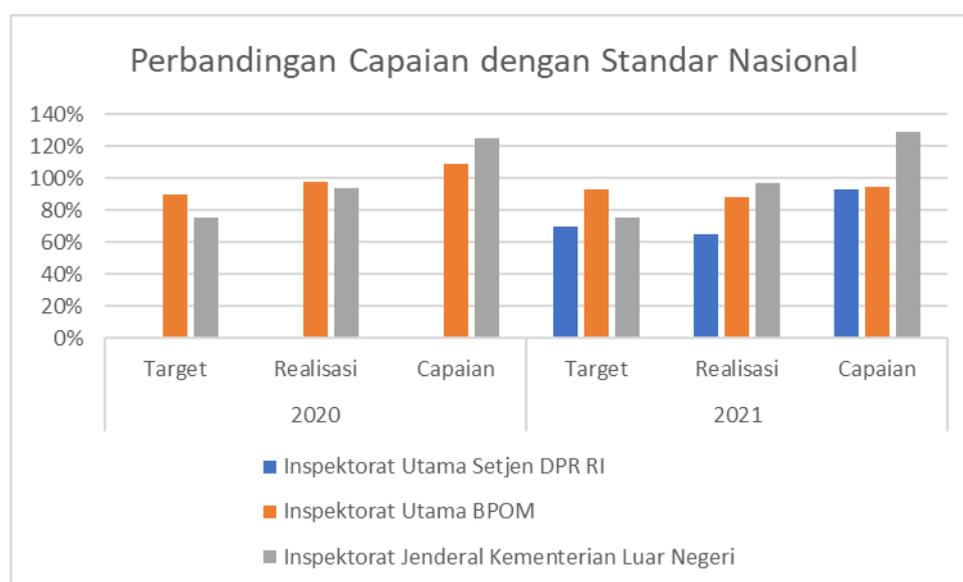
**Tabel 3.45 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional**

Kementerian/Lembaga	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat II Setjen DPR RI	Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II	-	-	-	70%	65,31%	93,3%
Inspektorat Utama BPOM	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	90%	97,98%	108,86%	93%	88,25%	94,89%

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT II TAHUN 2022

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Kementerian/Lembaga	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri	Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II	75%	93,76%	125,01%	75%	96,72%	128,96%



**Grafik 3.13 Perbandingan capaian dengan standar nasional**

Berdasarkan data di atas, jika dibandingkan dengan kementerian/lembaga lain, realisasi indikator kinerja Inspektorat II Sekretariat Jenderal DPR RI mempunyai persentase capaian realisasi indikator kinerja yang lebih rendah yaitu sebesar 93,3%. Pada tahun

2020, indikator kinerja terkait persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat II tahun 2020, sehingga tidak diketahui nilai target dan realisasinya. Dari tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja Inspektorat Utama BPOM mengalami penurunan sebesar 12,83% dari tahun 2020. Sedangkan persentase capaian indikator kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri mengalami kenaikan sebesar 3,16%.

**7.5. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

**Tabel 3.46**

**Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II	Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II	50%	83,52%	167,04%	Faktor penyebab keberhasilan, yaitu:  a. Adanya koordinasi yang intensif dengan unit kerja penanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut serta verifikasi kelengkapan dan keakuratan data dukung oleh Auditor Inspektorat II;	Upaya yang dilakukan dalam mencapai target yang ditetapkan, antara lain:  a. Secara konsisten dalam mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur.

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

						<p>b. Peningkatan kompetensi auditor sehingga rekomendasi yang diberikan kepada auditan lebih jelas dan tidak multitafsir serta lebih sesuai dengan kebutuhan akan perbaikan yang dibutuhkan oleh organisasi. Hal ini akan mendorong unit kerja untuk dapat lebih cepat dalam melaksanakan tindak lanjut terhadap suatu rekomendasi.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

**7.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 3.47**

**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II	Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi APIP di lingkup tugas Inspektorat II	50%	83,52%	167,04%	Rp5.419.400,-	Rp5.419.400,-	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II” dengan indikator kinerja “Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Sasaran program dengan indikator kinerja tersebut di atas sudah mencapai target dengan capaian sebesar 167,04% atau meningkat sebesar 79,03% dari tahun 2021 dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 100%.

**7.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat II selama tahun 2022 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II”, antara lain:

- a. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT II TAHUN 2022

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

- pengawasan Inspektorat II.
- b. Pendampingan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan APIP kepada unit kerja di lingkup pengawasan Inspektorat II.



Gambar 3.11 Pendampingan dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan APIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**B. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2022, Inspektorat II didukung oleh anggaran sebesar Rp1.405.896.000,- (satu milyar empat ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Adapun realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp1.405.893.906,- (satu milyar tujuh puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah) atau 100% dari total pagu anggaran, adapun rincian realisasi anggaran Inspektorat II pada masing-masing triwulan dijelaskan pada tabel dan grafik berikut:

**Tabel 3.48  
Realisasi Anggaran Inspektorat II Triwulan I-IV**

No	Uraian	Pagu	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
1	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	212,679,000	41,238,560	44,000,000	82,140,000	45,300,000	212,678,560
2	Belanja Jasa Profesi	10,800,000	0	5,400,000	0	5,400,000	10,800,000
3	Belanja Jasa Lainnya	21,787,000	17,425,000	4,362,000	0	0	21,787,000
4	Belanja Perjalanan Biasa	260,023,000	33,812,400	76,342,000	90,672,900	59,195,461	260,022,761
5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	215,522,000	0	110,145,000	0	105,377,000	215,522,000
6	Belanja Perjalanan Biasa	218,586,000	0	181,789,600	0	36,795,955	218,585,555
7	Belanja Bahan	12,140,000	0	1,750,000	10,390,000	0	12,140,000
8	Belanja Bahan	2,100,000	0	0	0	2,100,000	2,100,000

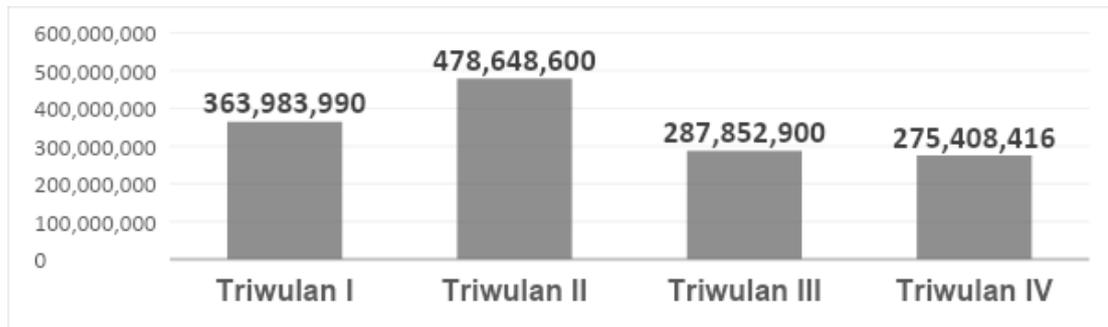
**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

**INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

9	Belanja Bahan	2,399,000	330,000	0	0	2,069,000	2,399,000
10	Belanja Bahan	2,775,000	0	0	0	2,775,000	2,775,000
11	Belanja Bahan	5,800,000	3,500,000	2,300,000	0	0	5,800,000
12	Belanja Bahan	26,166,000	3,360,000	5,950,000	12,760,000	4,096,000	26,166,000
13	Belanja Jasa Profesi	14,400,000	4,500,000	0	7,200,000	2,700,000	14,400,000
14	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	40,500,000	8,700,000	0	22,200,000	9,600,000	40,500,000
15	Belanja Bahan	21,291,000	15,450,030	3,500,000	2,340,000	0	21,290,030
16	Belanja Jasa Profesi	24,300,000	5,400,000	18,900,000	0	0	24,300,000
17	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	84,360,000	0	24,210,000	60,150,000	0	84,360,000
18	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	230,268,000	230,268,000	0	0	0	230,268,000
	Total Inspektorat II	1,405,896,000	363,983,990	478,648,600	287,852,900	275,408,416	1,405,893,906
		0	0	0	0	6	6
		100.00%	25.89%	34.05%	20.47%	19.59%	100.00%

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT II TAHUN 2022

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



Grafik 3.14 Realisasi Anggaran Inspektorat II per Triwulan Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, anggaran Inspektorat II yang ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsinya, paling banyak direalisasikan pada Triwulan II, yaitu sebesar 34.05% dari total pagu anggaran.

Penggunaan Anggaran Inspektorat II sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1.1. Layanan Pengembangan APIP
  - a) Kegiatan Pengembangan Kapabilitas menggunakan anggaran sebesar Rp720.810.321,- dari pagu sebesar Rp720.811.000,-; dan
  - b) Kegiatan *Knowledge Sharing* menggunakan anggaran sebesar Rp218.585.555,- dari pagu sebesar Rp218.586.000,-.
- 1.2. Layanan Koordinasi Inspektorat II
  - a) Kegiatan Penyusunan Program Kerja menggunakan anggaran sebesar Rp12.140.000,- dari pagu sebesar Rp12.140.000,-; dan
  - b) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja, Laporan Kinerja dan PKPT menggunakan anggaran sebesar Rp2.100.000,- dari pagu sebesar Rp2.100.000,-.
- 1.3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI menggunakan anggaran sebesar Rp2.399.000,- dari pagu sebesar Rp2.399.000,-.
- 1.4. Layanan Audit Internal
  - a) Kegiatan Audit menggunakan anggaran sebesar Rp2.775.000,- dari

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

- pagu sebesar Rp2.775.000,-;
- b) Kegiatan Reviu menggunakan anggaran sebesar Rp5.800.000,- dari pagu sebesar Rp5.800.000,-;
- c) Kegiatan Evaluasi menggunakan anggaran sebesar Rp81.066.000,- dari pagu sebesar Rp81.066.000,-; dan
- d) Kegiatan Pengawasan Lainnya menggunakan anggaran sebesar Rp360.218.030,- dari pagu sebesar Rp360.219.000,-.



Grafik 3.14 Penggunaan Anggaran Inspektorat II Triwulan I-IV Tahun 2022

**Tabel 3.49**

**Realisasi Penggunaan Anggaran Inspektorat II Triwulan I-IV Tahun 2022**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	Layanan Pengembangan APIP	939.397.000	939.395.876	100%

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

2.	Layanan Koordinasi Inspektorat II	14.240.000	14.240.000	100%
3.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.399.000	2.399.000	100%
4.	Layanan Audit Internal	449.860.000	449.859.030	100%
<b>Total</b>		<b>1.405.896.000</b>	<b>1.405.893.906</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan data di atas, penggunaan Anggaran Inspektorat II sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 paling banyak digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan Layanan Pengembangan APiP.



# 4

## PENUTUP

Kesimpulan  
Rekomendasi

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat II Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai sasaran program Inspektorat Utama Tahun 2022. Secara umum, capaian kinerja Inspektorat II telah tercapai, namun masih ada yang perlu peningkatan. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja, 3 (tiga) indikator telah melampaui dari target yaitu, indikator kinerja persentase realisasi anggaran Inspektorat II, persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II, persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II. Empat indikator kinerja sesuai target yaitu jumlah unit Eselon II yang telah menyusun *Risk Register*, jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK, tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II, tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II.

Inspektorat II sebagai unsur pengawasan dalam sebuah organisasi memiliki peran yang strategis dan mendasar dalam pengelolaan/manajemen unit kerja dalam lingkungan Setjen DPR RI, tidak hanya berperan dalam pembinaan dan pemberian dukungan pengawasan kepada seluruh unit saja, namun juga sebagai perekat, penopang, dan penunjang dalam organisasi Setjen DPR RI melalui kegiatan *assurance* dan *consulting*. Mengingat hal tersebut, agar fungsi dan peran Inspektorat dapat dengan optimal berjalan, yang secara otomatis mendorong peningkatan kinerja diperlukan beberapa langkah strategis yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kegiatan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
2. Menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan unit kerja khususnya pada pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP demi terciptanya *Good Corporate Governance*.

**LAMPIRAN**



SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SATKER SETJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn  
Jabatan : Inspektur II

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA  
Jabatan : Inspektur Utama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

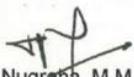
Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

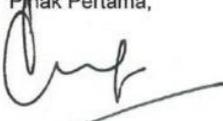
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, 21 Desember 2021

Pihak Pertama,

  
Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA  
NIP. 196207191988031001

  
Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn  
NIP. 196811251993022001

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2022**

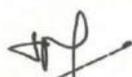
INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	1. Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun Risk Register	11 unit
		2. Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK	3 unit
		3. Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	100%
		4. Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	100%
		5. Persentase realisasi anggaran Inspektorat II	92,5%
2.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II	1. Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	70%
		2. Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II	50%

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp5.371.262.000,-

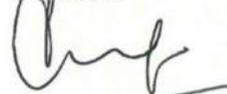
Inspektur Utama,



Drs. Setyanta Nuaraha, M.M., QGIA  
NIP. 19620719 198803 1 001

Jakarta, 21 Desember 2021

Inspektur II,



Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn  
NIP. 19681125 199302 2 001